

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

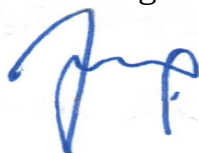
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Veri Anggrijono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan Umum	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
Pengungkapan Penting Lainnya	66
Lampiran dan Daftar	75

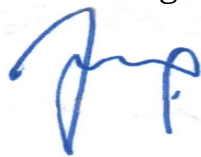
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Veri Anggrijono

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (*Audited*) Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.30.108.160.496 atau mencapai 22,7 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.26.491.454.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp.233.252.591.166 atau mencapai 98,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.238.633.750.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.798.283.105.732 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.938.452.208; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.759.238.665.863; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.36.105.987.661. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.176.069.303 dan Rp.797.107.036.429.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp.30.022.647.347, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.227.432.645.513 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(197.409.998.166). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. (3.006.627.664) dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(200.416.625.830).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.794.334.362.255 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(200.416.625.830) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.46.911.759 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.203.142.388.245 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.797.107.036.429.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	26,491,454,000	30,108,160,496	113.65	24,455,228,824
JUMLAH PENDAPATAN		26,491,454,000	30,108,160,496	113.65	24,455,228,824
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	86,146,131,000	85,372,459,308	99.10	74,862,308,504
Belanja Barang	B.4	124,731,125,000	120,790,350,820	96.84	114,158,974,218
Belanja Modal	B.5	27,756,494,000	27,089,781,038	97.60	12,634,495,243
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		238,633,750,000	233,252,591,166	97.75	201,655,777,965

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	114,498,500	114,498,500
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	42,750,000	1,400,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	169,833,453	150,255,771
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.4	16,730,000	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	140,209,814	216,693,573
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(121,027,049)	(119,696,602)
Persediaan	C.7	2,575,457,490	2,126,965,530
Jumlah Aset Lancar		2,938,452,208	2,490,116,772
ASET TETAP			
Tanah	C.8	610,723,350,672	593,083,855,000
Peralatan dan Mesin	C.9	377,235,507,606	354,070,105,321
Gedung dan Bangunan	C.10	95,097,157,667	92,544,099,306
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	1,256,957,452	1,256,957,452
Aset Tetap Lainnya	C.12	1,619,451,685	1,557,052,921
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(326,693,759,219)	(306,316,176,967)
Jumlah Aset Tetap		759,238,665,863	736,195,893,033
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	13,259,615,600	13,239,685,100
Aset Lain-Lain	C.15	62,488,869,851	86,942,807,273
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(39,642,497,790)	(42,846,769,752)
Jumlah Aset Lainnya		36,105,987,661	57,335,722,621
JUMLAHASET		798,283,105,732	796,021,732,426
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.17	114,498,500	114,498,500
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	485,216,943	690,390,932
Pendapatan Diterima di Muka	C.19	576,353,860	879,055,089
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	3,425,650
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,176,069,303	1,687,370,171
JUMLAH KEWAJIBAN		1,176,069,303	1,687,370,171
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	797,107,036,429	794,334,362,255
JUMLAH EKUITAS		797,107,036,429	794,334,362,255
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		798,283,105,732	796,021,732,426

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	30,022,647,347	23,771,621,001
JUMLAH PENDAPATAN		30,022,647,347	23,771,621,001
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	85,120,675,294	74,987,151,027
Beban Persediaan	D.3	9,349,500,997	10,391,928,451
Beban Barang dan Jasa	D.4	53,969,985,092	51,808,469,054
Beban Pemeliharaan	D.5	13,380,163,426	12,458,053,478
Beban Perjalanan Dinas	D.6	43,452,424,361	39,931,579,138
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	22,158,565,896	21,422,502,673
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1,330,447	118,399,722
JUMLAH BEBAN		227,432,645,513	211,118,083,543
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(197,409,998,166)	(187,346,462,542)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(3,023,002,053)	(94,726,000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		103,424,000	6,774,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3,126,426,053	101,500,000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		16,374,389	355,093,839
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,007,848,576	401,096,651
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,991,474,187	46,002,812
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3,006,627,664)	260,367,839
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(200,416,625,830)	(187,086,094,703)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(200,416,625,830)	(187,086,094,703)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	794,334,362,255	292,289,167,337
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(200,416,625,830)	(187,086,094,703)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	4,911,759	511,971,178,080
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	506,806,980,045
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	46,911,759	5,164,198,035
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		46,911,759	511,971,178,080
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	203,142,388,245	177,160,111,541
EKUITAS AKHIR	E.5	797,107,036,429	794,334,362,255

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010.

Entitas berkedudukan di Gedung I Lantai 3 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110.

Mengacu kepada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi dan visi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menetapkan Strategi Kebijakan :

A. Peningkatan perlindungan konsumen dalam negeri Serta pengamanan pasar domestik

1. Pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga, dilakukan melalui :

- a. Telusuran standar ukuran secara nasional dan internasional.
- b. Penyiapan rumusan peraturan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

2. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kegiatan pengawasan barang beredar.
- b. Peningkatan jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi.

3. Peningkatan tertib ukur, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan UTTP yang telah memenuhi peraturan yang berlaku

B. Penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, *trading house*, lembaga perlindungan konsumen dan eksportir agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan

1. Peningkatan kelembagaan dan SDM di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga,

dilakukan melalui :

- a. Peningkatan akumulasi BPSK yang terbentuk.
- b. Peningkatan akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen.

2. Optimalisasi pemberdayaan konsumen, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pemahaman konsumen dan tanggungjawab pengusaha.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan

setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	26,491,454,000	30,108,160,496
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	26,491,454,000	30,108,160,496
Belanja		
Belanja Pegawai	87,149,265,000	86,146,131,000
Belanja Barang	108,763,503,000	124,731,125,000
Belanja Modal	21,337,232,000	27,756,494,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	217,250,000,000	238,633,750,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp.30.108.160.496*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.30.108.160.496 atau mencapai 112,01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.26.491.454.000. Pendapatan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	-	109,115,772	-
Pendapatan Jasa	26,491,454,000	29,672,139,529	112.01
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tipikor	-	-	-
Pendapatan luran dan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	326,905,195	-
Jumlah	26,491,454,000	30,108,160,496	112.01

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan 23,12 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan Jasa, serta pendapatan Lain-lain.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	109,115,772	7,059,002	1445.77
Pendapatan Jasa	29,672,139,529	24,320,290,580	22.01
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tipikor	-	-	#DIV/0!
Pendapatan luran dan Denda	-	40,260	-100.00
Pendapatan Lain-lain	326,905,195	127,838,982	155.72
Jumlah	30,108,160,496	24,455,228,824	23.12

Belanja

Rp.233.252.591.166

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp.233.252.591.166 atau 97,75% dari anggaran belanja sebesar Rp.238.633.750.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	86,146,131,000	85,372,459,308	99.10
Belanja Barang	124,731,125,000	120,790,350,820	96.84
Belanja Modal	27,756,494,000	27,089,781,038	97.60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	238,633,750,000	233,252,591,166	97.75
Pengembalian		(904,227,657)	-
Jumlah	238,633,750,000	232,348,363,509	97.37

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran terhadap belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	85,414,327,902	74,890,184,491	14.05
Belanja Barang	121,652,709,883	115,260,380,776	5.55
Belanja Modal	27,089,781,038	12,634,495,243	114.41
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	234,156,818,823	202,785,060,510	15.47

*Belanja Pegawai
Rp.85.414.327.902*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.85.414.327.902 dan Rp. 74.890.184.491. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,05 persen dari TA 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42,039,302,921	40,063,392,972	4.93
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	6,844,200	44,487,300	(84.62)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	2,667,651,650	-
Belanja Lembur	883,858,000	955,327,000	(7.48)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	42,484,322,781	31,159,325,569	36.35
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	85,414,327,902	74,890,184,491	14.05
Pengembalian Belanja Pegawai	(41,868,594)	(27,875,987)	50.20
Jumlah Belanja	85,372,459,308	74,862,308,504	14.04

Belanja Barang
Rp.121.652.709.883

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.121.652.709.883 dan Rp. 115.260.380.776. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 5,55% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya beberapa belanja sepanjang TA 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15,417,980,983	12,109,896,215	27.32
Belanja Barang Non Operasional	15,560,937,351	19,500,529,603	(20.20)
Belanja Kontribusi	21,007,250	18,497,875	13.57
Belanja Barang Persediaan	11,710,462,708	11,929,062,669	(1.83)
Belanja Jasa	22,820,790,397	20,060,906,487	13.76
Belanja Pemeliharaan	11,769,543,349	10,586,955,982	11.17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	40,734,302,121	38,997,893,292	4.45
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3,617,685,724	2,056,638,653	75.90
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	121,652,709,883	115,260,380,776	5.55
Pengembalian Belanja	(862,359,063)	(1,101,406,558)	(21.70)
Jumlah Belanja	120,790,350,820	114,158,974,218	5.81

Belanja Modal
Rp.27.089.781.038

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.27.089.781.038 dan Rp. 12.634.495.243. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 114,41% dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk belanja modal pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,245,393,610	8,916,888,270	171.90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,463,488,164	1,596,186,323	54.34
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	380,899,264	2,121,420,650	(82.05)
Jumlah Belanja Kotor	27,089,781,038	12,634,495,243	114.41
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	27,089,781,038	12,634,495,243	114.41

Belanja Modal Tanah Rp.0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.24.245.393.610

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp.24.245.393.610, mengalami kenaikan sebesar 171,90% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp. 8.916.888.270. Hal ini disebabkan oleh pemotongan anggaran atas belanja

modal peralatan dan mesin.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.2.463.488.164*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.2.463.488.164 dan Rp. 1.596.186.323.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	2,463,488,164	1,596,186,323	35.21
Jumlah Belanja Kotor	2,463,488,164	1,596,186,323	35.21
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2,463,488,164	1,596,186,323	35.21

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp.0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Lainnya
Rp.380.899.264*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.380.899.264 dan Rp. 2.121.420.650.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0.00
-	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.114.498.500*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.114.498.500 dan Rp.114.498.500 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	114.498.500	114.498.500	0	0,00
	Jumlah	114.498.500	114.498.500	0	0,00

Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PKTN

Satuan Kerja	31-12-2018 (Rp)	Penyetoran (Rp)	NTPN	Tgl Setor	Saldo (Rp)
Prov. Riau (099025)	114.498.500	0	-	-	114.498.500
Jumlah	114.498.500	0	-	-	114.498.500

Catatan:

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran satker Dinas Perindag Provinsi Riau (satker yang sudah tidak memperoleh DIPA dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sejak tahun 2013) sebesar Rp114.498.500 merupakan sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan di tahun 2012, sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian pada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.42.750.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp.42.750.000 dan Rp.1.400.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	42.750.000	1.400.000	41.350.000	2.953,57
	Jumlah	42.750.000	1.400.000	41.350.000	2.953,57

*Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan
Ditjen PKTN*

Satuan Kerja	31-12-2018 (Rp)	Penyetoran (Rp)	NTPN	Tgl Setor	Saldo (Rp)
Dit. Metrologi	42.750.000	0	-	-	42.750.000
Jumlah	42.750.000	0	-	-	42.750.000

Catatan:

Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Direktorat Metrologi sebesar Rp.42.750.000 yang belum disetor dikarenakan terdapat transaksi transfer masuk ke rekening Bendahara Penerimaan yang tidak diketahui siapa pihak yang mentransfer.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.169.833.453*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.169.833.453 dan Rp.150.255.771.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari

UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	169.833.453	150.255.771	19.577.682	13,03
	Jumlah	169.833.453	150.255.771	19.577.682	13,03

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PKTN

Satuan Kerja	31-12-2018 (Rp)	Penyetoran/ Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo (Rp)	
Set. Ditjen PKTN	11.054.000	0	-	-	11.054.000	
Dit. Metrologi	120.422.000	120.422.000	-	-		
	739.000	739.000	D39397L7P4PT6ML U	07-01- 2019	0	
	37.581.981	100.000		BAA764V3CEPF5M JP	03-01- 2019	0
		120.000		E3DB24V25EQBJ0J P	03-01- 2019	
		2.968.300		838456AG9G4188C 9	04-01- 2019	
		2.004.918		314486AGUELMOG C9	04-01- 2019	
		350.299		12DF66AHJ3TBGV C9	04-01- 2019	
		3.237.300		656EB406KQ2NKG6 P	09-01- 2019	
		579.700		0318A4092QOUPS6 P	09-01- 2019	
		3.671.600		C5841407Q25MOG 6P	09-01- 2019	
		2.948.000		34F2740AFTIHVV6P	09-01- 2019	
		2.947.800		490A640BMTHLIL6 P	09-01- 2019	
		4.398.400		C6B550HMP8LUB4 39	18-01- 2019	
		98.000		3FCFC0HQBU334U 39	18-01- 2019	
5.141.200			390C129RHTJVKEC P	21-01- 2019		
9.016.464		032FC4EKI267ISTP	23-01- 2019			
Prov. Jawa Timur	36.472	0	-	-	36.472	
Jumlah	169.833.453	158.742.981	-	-	11.090.472	

Catatan:

- a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Set. Ditjen PKTN sebesar Rp.11.054.000 merupakan uang duka yang masih ditahan oleh Bendahara Pengeluaran dikarenakan terdapat sengketa pada ahli waris.
- b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Metrologi sebesar Rp.158.742.981 terdiri dari:
 - Uang makan PNS bulan Desember 2018 yang telah dicairkan melalui TUP pada bulan Desember 2018, namun baru diserahkan kepada pegawai bulan Januari 2019 sebesar Rp.120.422.000.
 - Kelebihan uang makan dan lembur PPNPN bulan Desember 2018 yang dibayarkan di bulan Januari 2019 sebesar Rp.739.000.
 - Pengembalian perjalanan dinas biasa tahun 2018 yang belum disetor di tahun 2018 oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.37.581.981.
- c. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diperoleh informasi setoran atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp.36.472 pada satker Prov. Jawa Timur (satker tidak aktif).

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp.16.730.000*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.16.730.000 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2018 dan 2017*

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	16.730.000	0	16.730.000	0,00
	Jumlah	16.730.000	0	16.730.000	0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 sebesar Rp.16.730.000 terdapat pada satker Direktorat Metrologi yang merupakan sewa lahan ATM BJB yang belum dibuat perjanjian kerja sama periode baru dan pembayaran oleh Bank BJB dikarenakan belum dikeluarkan nilai sewa baru dari KPKNL, sehingga perhitungannya menggunakan nilai kontrak bruto sebelumnya.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp.140.209.814*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp.140.209.814 dan Rp.216.693.573 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2018 dan 2017*

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	140.209.814	216.693.573	(76.483.759)	(35,30)
	Jumlah	140.209.814	216.693.573	(76.483.759)	(35,30)

Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp.140.209.814 terdiri dari:

- a. Piutang Bukan Pajak pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp.6.283.965, merupakan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
- b. Piutang Bukan Pajak pada BSML Regional I Medan sebesar Rp.1.266.476 terdiri dari:
 - Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 sebesar Rp.301.826 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
 - Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember 2018 sebesar Rp.964.650.
- c. BSML Regional II D.I. Yogyakarta sebesar Rp508.437 terdiri dari:
 - Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 sebesar Rp.349.487 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
 - Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember 2018 sebesar Rp.158.950.
- d. BSML Regional III Banjarmasin sebesar Rp.1.087.052 terdiri dari:
 - Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 sebesar Rp.82.107 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
 - Kelebihan belanja uang makan bulan Desember

2018 sebesar Rp.735.750.

- Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember 2018 sebesar Rp.269.195.
- e. BSML Regional IV Makassar sebesar Rp892.386 terdiri dari:
- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 sebesar Rp.252.495 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
 - Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember 2018 sebesar Rp.544.495.
 - Sewa rumah dinas yang belum dibayarkan untuk bulan Januari 2018 sebesar Rp.95.396.
- f. Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Metrologi sebesar Rp.4.447.752 terdiri dari:
- Piutang atas kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 sebesar Rp.4.410.252 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
 - Piutang atas kelebihan perjalanan dinas tahun sebelumnya sebesar Rp.37.500.
- g. Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebesar Rp.4.696.885 merupakan kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember 2018 yang pembayarannya akan dikompensasikan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2019.
- h. Piutang Bukan Pajak pada Balai Pengujian Mutu Barang sebesar Rp.121.026.861, terdiri dari:

No	Nama	No. SPK	Tgl. SPK	Rupiah
1	PT World Star Jaya	1872-PN	21-11-2013	30.238.620
2	PT Galuh Putra Group	0895-PN	26-06-2014	530.784
3	PT Galuh Putra Group	0949-PN	07-07-2014	1.415.425
4	PT Galuh Putra Group	0950-PN	07-07-2014	1.415.425
5	PT Galuh Putra Group	0951-PN	07-07-2014	1.415.425
6	PT Citra Adiatama Indonesia	0979-PN	11-07-2014	6.594.593
7	PT Yaka	0108-PN	23-01-2015	8.444.296
8	PT Yaka	0109-PN	23-01-2015	8.444.296
9	PT Putra Selatan	0265-PN	04-03-2015	1.793.407
10	PT Yaka	0110-PN	23-01-2015	9.650.623
11	PT Yaka	0111-PN	23-01-2015	9.650.623
12	FA Mata Passo	0616-PN	08-05-2015	2.420.698
13	PT Jesevin Anugerah Sejati	0693-PN	25-05-2015	1.487.804
14	PT Wanita Panca Usaha	0694-PN	25-05-2015	1.487.804
15	CV Berill	1343-PN	10-09-2015	965.062
16	Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah	1386-PN	15-09-2015	1.286.750
17	CV Verimer	1225-PN	28-08-2015	160.844
18	CV Verimer	1226-PN	28-08-2015	804.219
19	PT Sarana Makmur Abadi	1876-PN	23-11-2015	4.222.148
20	PT Goodyear	2130-PN	22-12-2015	2.412.656
21	PT Goodyear	2131-PN	22-12-2015	5.307.843
22	CV Indo Dermaga	0089-PN	12-01-2016	1.721.028
23	CV Indo Dermaga	0090-PN	12-01-2016	2.581.542
24	PT Niaga Putra Bangsa	0193-PN	29-01-2016	1.182.201
25	PT Sinar Global Mulia	0266-PN	15-02-2016	1.190.244
26	PT Pos Indonesia	0667-PN	4-04-2016	1.351.087
27	PT Pos Indonesia	0668-PN	14-04-2016	1.351.087
28	CV Semesta Jaya Lestari	0674-PN	15-04-2016	386.025
29	CV Semesta Jaya Lestari	0675-PN	15-04-2016	2.573.500
30	PT Viva Teknik Mandiri	0546-PN	30-03-2016	3.538.562
31	PT Nusamas Kimia Persada	0787-PN	04-05-2016	160.844
32	CV Sentra Sukses	0905-PN	20-05-2016	2.420.698
33	CV Sentra Sukses	0904-PN	20-05-2016	2.420.698
	Jumlah	-	-	121.026.861

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp.121.027.049)*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

masing-masing sebesar (Rp.121.027.049) dan (Rp.119.696.602) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji pada tabel berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(121.027.049)	(119.696.602)	(1.330.447)	1,11
	Jumlah	(121.027.049)	(119.696.602)	(1.330.447)	1,11

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTN sebesar (Rp.121.027.049) terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak atas kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) sebesar (Rp.0) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Satker	Piutang	Lancar (0,5%)
1	Sekretariat Ditjen PKTN	6.283.965	0
2	BSML Regional I Medan	1.266.476	0
3	BSML Regional II D.I. Yogyakarta	508.437	0
4	BSML Regional III Banjarmasin	1.087.052	0
5	BSML Regional IV Makassar	892.386	0
6	Dit. Standalitu	4.696.885	0
	Jumlah	14.735.201	0

Catatan:

Piutang Bukan Pajak berupa piutang tunjangan kinerja seharusnya tidak dilakukan penyisihan piutang, hal ini berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa “Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan

untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya.”

- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTN terdapat pada satker BPMB sebesar (Rp.121.026.861) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Piutang	Macet (100%)
1	PT World Star Jaya	30.238.620	30.238.620
2	PT Galuh Putra Group	530.784	530.784
3	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
4	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
5	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
6	PT Citra Adiatama Indonesia	6.594.593	6.594.593
7	PT Yaka	8.444.296	8.444.296
8	PT Yaka	8.444.296	8.444.296
9	PT Putra Selatan	1.793.407	1.793.407
10	PT Yaka	9.650.623	9.650.623
11	PT Yaka	9.650.623	9.650.623
12	FA Mata Passo	2.420.698	2.420.698
13	PT Jesevin Anugerah Sejati	1.487.804	1.487.804
14	PT Wanita Panca Usaha	1.487.804	1.487.804
15	CV Berill	965.062	965.062
16	Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah	1.286.750	1.286.750
17	CV Verimer	160.844	160.844
18	CV Verimer	804.219	804.219
19	PT Sarana Makmur Abadi	4.222.148	4.222.148
20	PT Goodyear	2.412.656	2.412.656
21	PT Goodyear	5.307.843	5.307.843
22	CV Indo Dermaga	1.721.028	1.721.028
23	CV Indo Dermaga	2.581.542	2.581.542
24	PT Niaga Putra Bangsa	1.182.201	1.182.201
25	PT Sinar Global Mulia	1.190.244	1.190.244
26	PT Pos Indonesia	1.351.087	1.351.087
27	PT Pos Indonesia	1.351.087	1.351.087
28	CV Semesta Jaya Lestari	386.025	386.025
29	CV Semesta Jaya Lestari	2.573.500	2.573.500
30	PT Viva Teknik Mandiri	3.538.562	3.538.562

31	PT Nusamas Kimia Persada	160.844	160.844
32	CV Sentra Sukses	2.420.698	2.420.698
33	CV Sentra Sukses	2.420.698	2.420.698
	Jumlah	121.026.861	121.026.861

- c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Metrologi sebesar (Rp.188) merupakan penyisihan piutang lancar (0,5%) atas piutang kelebihan perjalanan dinas tahun sebelumnya sebesar Rp.37.500.

Persediaan

Rp.2.575.457.490

C.7 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp.2.575.457.490. dan Rp.2.126.965.530. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Rician Persediaan TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	2.575.457.490	2.126.965.530	448.491.960	21,09
	Jumlah	2.575.457.490	2.126.965.530	448.491.960	21,09

Rincian Persediaan Ditjen PKTN

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	2,490,290,980	275,817,220
Barang untuk Pemeliharaan	10,296,380	3,112,505
Suku Cadang	10,690,240	6,086,850
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	1,816,430,000
Bahan Baku	64,179,890	25,518,955
Jumlah	2,575,457,490	2,126,965,530

C.8 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp.610.723.350.672 dan Rp.593.083.855.000. Rincian aset Tanah secara detail per 31 Desember 2018 pada tabel berikut:

Rincian Tanah TA 2018 dan 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	610.723.350.672	593.083.855.000	17.639.495.672	2,97
	Jumlah	610.723.350.672	593.083.855.000	17.639.495.672	2,97

Rincian Nilai Tanah sebesar Rp937.576.145.302 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Tanah Ditjen PKTN

No	Satker		KIB	Luas Tanah	Nilai
1	BSML I Medan	1	2.01.02.02.999. 1	3.515	14.474.770.000
2	BSML II D.I. Yogyakarta	1	2.01.01.04.001. 1	3.220	12.126.520.000
3	BSML III Banjarmasin	1	2.01.01.04.001. 1	10.271	27.556.497.000
4	BSML IV Makassar	1	2.01.01.04.001. 1	3.247	9.818.928.000
5	Ditstandalitu	1	2.01.01.04.001. 1	19.850	253.583.250.000
6	Dit. Metrologi	1	2.01.01.04.001. 1	4.922	34.093.439.000
		2	2.01.01.01.001. 2	1165	7.810.160.000
		3	2.01.01.01.002. 1	835	7.675.320.000
		4	2.01.01.01.004. 1	9.738	225.944.971.000
		5	2.01.01.01.003. 5	124	207.389.759
		6	2.01.01.01.003. 6	129	215.752.249
		7	2.01.01.01.003. 7	136	227.459.735
		8	2.01.01.01.003. 8	137	229.132.233
		9	2.01.01.01.003. 9	132	220.769.743

		10	2.01.01.01.003. 10	134	224.114.739
		11	2.01.01.01.003. 11	122	204.044.763
		12	2.01.01.01.003. 12	122	204.044.763
		13	2.01.01.01.003. 13	113	188.992.280
		14	2.01.01.01.003. 14	116	194.009.774
		15	2.01.01.01.003. 15	141	235.822.226
		16	2.01.01.01.003. 16	135	225.787.237
		17	2.01.01.01.003. 17	444	1.273.726.195
		18	2.01.01.01.003. 18	419	1.202.007.378
		19	2.01.01.01.003. 19	313	897.919.593
		20	2.01.01.01.003. 20	165	331.045.468
		21	2.01.01.01.003. 21	155	310.982.106
		22	2.01.01.01.003. 22	155	310.982.106
		23	2.01.01.01.003. 23	143	286.906.072
		24	2.01.01.01.003. 24	165	331.045.468
		25	2.01.01.01.003. 25	498	999.155.412
		26	2.01.01.01.003. 26	134	224.114.740
		27	2.01.01.01.003. 27	2.397	4.005.651.265
		28	2.01.01.01.003. 28	1.424	4.888.640.368
Jumlah				64.716	610.723.350.672

Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	17.639.495.672
Saldo per 31 Desember 2018	17.639.495.672

Mutasi Tambah berupa Reklasifikasi Masuk sebesar Rp.17.639.495.672 terdapat pada satker Direktorat Metrologi.

Peralatan dan

Mesin

Rp.377.235.507.606

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan

2017 adalah Rp.377.235.507.606. dan Rp.354.070.105.321. Rincian aset Peralatan dan Mesin secara detail per 31 Desember 2018 pada tabel berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	377.235.507.606	354.070.105.321	23.165.402.285	6,54
	Jumlah	377.235.507.606	354.070.105.321	23.165.402.285	6,54

Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp.377.235.507.606 terdapat pada satker-satker berikut:

No	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	3.131.412.183
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	131.245.997.904
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	6.117.514.600
4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	2.883.469.022
5	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	3.139.458.500
6	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	11.636.508.357
7	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal IV	9.737.056.396
8	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	10.962.914.454
9	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	10.362.605.500
10	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	11.284.315.836
11	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	127.820.198.041
12	090.09.647931	Balai Kalibrasi	46.902.715.763
13	090.09.890563	Balai Sertifikasi	2.011.341.050
		Jumlah	377.235.507.606

*Gedung dan
Bangunan
Rp.95.097.157.667*

C.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.95.097.157.667 dan Rp.92.544.099.306. Terdapat kenaikan pada nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.553.058.361

Rincian Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	95.097.157.667	92.544.099.306	2.553.058.361	2,76
	Jumlah	95.097.157.667	92.544.099.306	2.553.058.361	2,76

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp.95.097.157.667 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	14.842.266.470
2	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	4.396.341.000
3	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	5.608.873.000
4	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	3.790.165.000
5	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	7.797.026.197
6	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	58.662.486.000
Jumlah			95.097.157.667

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp.1.256.957.452*

C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.256.957.452 dan Rp.1.256.957.452. Tidak terdapat perubahan pada nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan /sebesar Rp. 0

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	1.256.957.452	1.256.957.452	0	0,00
Jumlah		1.256.957.452	1.256.957.452	0	0,00

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

- Saldo Jalan dan Jembatan sebesar Rp.646.240.000 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	256.999.000
2	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	389.241.000
Jumlah			646.240.000

- Saldo Irigasi sebesar Rp.192.866.000 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	31.843.000
2	090.09.447770	BSML Regional IV Makassar	6.913.000
3	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	154.110.000
Jumlah			192.866.000

3. Saldo Jaringan sebesar Rp.417.851.452 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	26.227.452
2	090.09.447365	Set. Ditjen PKTN	55.850.000
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	18.250.000
4	090.09.447761	BSML Regional I Medan	181.789.000
5	090.09.447777	BSML Regional III Banjarmasin	57.525.000
6	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	78.210.000
Jumlah			417.851.452

Aset Tetap Lainnya
Rp.1.619.451.685

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.1.619.451.685 dan Rp.1.557.052.921. Terdapat kenaikan pada nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 62.399.064

Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	1.619.451.685	1.557.052.921	62.398.764	4,01
Jumlah		1.619.451.685	1.557.052.921	62.398.764	4,01

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.619.451.685 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	2.834.200
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	227.853.301
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	2.818.500
4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan	8.123.500

		Jasa	
5	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	1.106.689.180
6	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	271.133.004
Jumlah			1.619.451.685

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya yang terdapat di Ditjen PKTN terdiri dari:

1. Bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp.1.520.854.685
2. Bahan bercorak kesenian sebesar Rp.98.597.000

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(326.693.759.219)*

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. (326.693.759.219) dan Rp.(306.316.176.967). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Terdapat kenaikan pada nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.20.377.582.252

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset TetapTA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(326.693.759.219)	(306.316.176.967)	(20.377.582.252)	6,65
	Jumlah	(326.693.759.219)	(306.316.176.967)	(22.377.582.252)	6,65

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	354.070.105.321	-317.015.366.187	37.054.739.134
2	Gedung dan Bangunan	92.474.790.430	-9.106.687.238	83.368.103.192
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.256.957.452	-571.705.794	685.251.658
4	Aset Tetap Lainnya	1.557.052.921	0	1.557.052.921
Akumulasi Penyusutan		449.358.906.124	-326.693.759.219	122.665.146.905

*Aset Tak Berwujud
Rp.13.259.615.600*

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp.13.259.615.600 dan Rp.13.239.685.100.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Terdapat kenaikan pada nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp.19.930.500

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	13.259.615.600	13.239.685.100	19.930.500	0,15
Jumlah		13.259.615.600	13.239.685.100	19.930.500	0,15

1. Saldo Software sebesar Rp12.352.004.550 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	1.333.569.750
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	346.780.000
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	9.150.852.500
4	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	792.836.000
5	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	416.771.300

6	090.09.647931	Balai Kalibrasi	49.720.000
7	090.09.890563	Balai Sertifikasi	261.475.000
Jumlah			12.352.004.550

2. Saldo Lisensi sebesar Rp.158.763.050 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	49.160.000
2	090.09.890563	Balai Sertifikasi	109.603.050
Jumlah			158.763.050

3. Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp.748.848.000 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	185.014.500
2	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	29.800.000
3	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	385.368.500
4	090.09.647931	Balai Kalibrasi	148.665.000
Jumlah			748.848.000

Aset Lain-Lain

Rp.62.488.869.851

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.62.488.869.851 dan Rp.86.942.807.273. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Terdapat penurunan pada nilai Aset Lain-Lain sebesar (Rp. 24.453.937.422).

Rincian Aset Lain-Lain TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	62.488.869.851	86.942.807.273	(24.453.937.422)	(28,13)
Jumlah		62.488.869.851	86.942.807.273	(24.453.937.422)	(28,13)

1. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp.28.504.774.761

terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	775.111.457
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	19.295.220.200
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	327.229.000
4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa	233.714.555
5	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	696.150.000
6	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	7.900.000
7	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	226.036.515
8	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	82.656.350
9	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	1.086.487.514
10	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	2.871.837.200
11	090.09.647931	Balai Kalibrasi	2.902.431.970
Jumlah			28.504.774.761

2. Saldo Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp.57.443.060.107 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	211.084.000
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	32.475.430.690
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	117.909.000
4	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	722.025.000
5	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal IV	147.320.000
6	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	171.259.000
7	090.09.890563	Balai Sertifikasi	139.067.400
Jumlah			33.984.095.090

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.39.642.497.790)*

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp.39.642.497.790) dan (Rp.42.846.769.752). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya TA 2018 dan TA 2017*

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(39.642.497.790)	(42.846.769.752)	3.204.271.962	(7,48)
	Jumlah	(39.642.497.790)	(42.846.769.752)	3.204.271.962	(7,48)

1. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar (Rp.26.500.713.598) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.40344 4	Direktorat Tertib Niaga	(771.086.457)
2	090.09.41251 2	Direktorat Metrologi	(17.472.347.119)
3	090.09.44736 5	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(327.229.000)
4	090.09.44773 0	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	(233.714.555)
5	090.09.44775 5	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	(696.150.000)
6	090.09.44776 1	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	(7.900.000)
7	090.09.44777 5	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	(216.101.598)
8	090.09.44777 7	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	(79.248.750)
9	090.09.44804 4	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	(1.086.487.514)
10	090.09.64792 7	Balai Pengujian Mutu Barang	(2.729.730.638)
11	090.09.64793 1	Balai Kalibrasi	(2.880.717.967)
	Jumlah		(26.500.713.598)

2. Saldo Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp.64.749.399.570) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(1.168.446.157)
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(346.780.000)
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	(8.564.985.000)
4	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	(699.095.375)
5	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	(296.632.968)
6	090.09.647931	Balai Kalibrasi	(18.645.000)
7	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(185.677.500)
Jumlah			(11.280.262.000)

3. Saldo Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar (Rp1.281.179.189) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(31.954.000)
2	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(66.879.464)
Jumlah			(98.833.464)

4. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar (Rp1.762.688.728) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(1.044.456.650)
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(117.909.000)
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	(145.570.000)
4	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal IV	(147.320.000)
5	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	(171.259.000)
6	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(136.174.078)
Jumlah			(1.762.688.728)

*Uang Muka dari
KPPN
Rp.114.498.500*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.114.498.500 dan

Rp.114.498.500. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	114.498.500	114.498.500	0	0,00
	Jumlah	114.498.500	114.498.500	0	0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN sebesar Rp9.249.403.176 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.0990 25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau	114.498.500
Jumlah			114.498.500

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.485.216.943*

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.485.216.943 dan Rp.690.390.932. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
9	Ditjen PKTN	485.216.943	690.390.932	(205.173.989)	(29,72)
	Jumlah	485.216.943	690.390.932	(205.173.989)	(29,72)

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp.132.501.000 terdiri dari:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.447365	Sekretariat Ditjen PKTN	74.241.000
2	090.09.447761	BSML Regional I Medan	9.112.000
3	090.09.447775	BSML Regional II D.I. Yogyakarta	49.148.000
Jumlah			132.501.000

- a. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada satker Sekretariat Ditjen PKTN sebesar Rp.74.241.000 merupakan uang makan pegawai bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019.
- b. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada satker BSML Regional I Medan sebesar Rp.9.112.000 merupakan uang makan pegawai bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019.
- c. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada satker BSML Regional II D.I. Yogyakarta sebesar Rp.49.148.000 merupakan merupakan uang makan pegawai bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019.

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp.274.385.943 terdiri dari:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Dit. Metrologi	72.396.242
2	090.09.447761	BSML Regional I Medan	21.117.292
3	090.09.447770	BSML Regional IV Makassar	21.349.100
4	090.09.447775	BSML Regional II D.I. Yogyakarta	14.333.355
5	090.09.447777	BSML Regional III Banjarmasin	14.690.981
6	090.09.448044	Dit. Standalitu	130.498.973
Jumlah			274.385.943

- a. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker Dit. Metrologi sebesar Rp.72.396.242 terdiri dari:
 - Tagihan langganan telepon bulan Desember 2018

yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.786.785.

- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.71.609.457.

b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker BSML Regional I Medan sebesar Rp.21.117.292 terdiri dari:

- Tagihan langganan telepon bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.584.085.
- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.20.201.207.
- Tagihan surat kabar dan majalah bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.332.000.

c. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker BSML Regoinal IV Makasar sebesar Rp.21.349.100 terdiri dari:

- Tagihan langganan telepon dan internet bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.3.512.600.
- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.13.689.500.
- Tagihan langganan Koran Fajar dan Kompas bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.198.000.
- Sewa fotocopy bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.3.949.000.

d. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada

satker BSML Regional II D.I. Yogyakarta sebesar Rp.14.333.355 terdiri dari:

- Tagihan langganan telepon bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.491.926.
- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.13.841.429.

e. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker BSML Regional III Banjarmasin sebesar Rp.14.690.981 terdiri dari:

- Tagihan langganan telepon bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.1.390.320.
- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.13.233.681.
- Tagihan langganan air bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.66.980.

f. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker Dit. Standalitu sebesar Rp.130.498.973 terdiri dari:

- Tagihan langganan telepon bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.2.093.541.
- Tagihan langganan listrik bulan Desember 2018 yang dibayarkan di Januari 2019 sebesar Rp.128.405.432.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp.78.330.000 terdiri dari:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.447365	Sekretariat Ditjen PKTN	11.054.000
2	090.09.412512	Dit. Metrologi	67.276.000
Jumlah			78.330.000

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker Set. Ditjen PKTN sebesar Rp.11.054.000 merupakan uang duka yang masih ditahan oleh Bendahara Pengeluaran karena terdapat sengketa pada ahli waris.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker Dit. Metrologi sebesar Rp.67.276.000 merupakan uang makan pegawai bulan Desember 2018 dicairkan melalui TUP bulan Desember sebesar Rp.120.422.000 sehingga terdapat kelebihan uang makan sebesar Rp.53.146.000.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.576.353.860*

C.19 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.576.353.860 dan Rp.879.055.089. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-12-2018 (Rp)	31-12-2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	576.353.860	879.055.089	(302.701.229)	(34,43)
	Jumlah	576.353.860	879.055.089	(302.701.229)	(34,43)

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp.576.353.860 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Dit. Metrologi	115.263.000
2	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	58.765.000
3	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	68.360.000
4	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	333.965.860
Jumlah			576.353.860

- a. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker Dit. Metrologi sebesar Rp115.263.000 merupakan pendapatan atas jasa pengujian yang belum selesai pelaksanaannya pada tahun 2018.
- b. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BSML Regional I Medan sebesar Rp.58.765.000 merupakan pendapatan jasa kalibrasi alat standar yang belum selesai pelaksanaannya pada tahun 2018.
- c. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BSML Regional II D.I. Yogyakarta sebesar Rp.68.360.000 merupakan pendapatan jasa kalibrasi yang belum selesai pelaksanaannya pada tahun 2018.
- d. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BPMB sebesar Rp.333.965.860 merupakan pendapatan atas jasa pengujian yang belum selesai pelaksanaannya pada tahun 2019

Ekuitas

Rp.797.107.036.429

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.797.107.036.429 dan Rp.794.334.362.255. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp.27.798.324.405*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.27.798.324.405 dan Rp.23.830.104.408. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	102.924.000	5.220.000	1872
Pendapatan Jasa	27.461.893.707	23.755.310.403	16
Pendapatan Iuran dan Denda	0	40.260	(100)
Pendapatan Lain-Lain	233.506.698	69.533.745	236
Jumlah	27.798.324.405	23.830.104.408	17

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pemindahtanganan BMN, Pendapatan Jasa berasal dari jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Hasil Tipikor berasal dari hasil denda dan sebagainya, Pendapatan Iuran dan Denda berasal dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, sedangkan pendapatan lain-lain berasal dari penerimaan kembali belanja Pegawai dan Barang TAYL serta penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

*Beban Pegawai
Rp.85.120.337.744*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.85.120.337.744 dan Rp. 101.437.649.289. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan
2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	28,669,625,940	29,109,397,650	(1.51)
Beban Pembulatan Gaji	406,926	413,082	(1.49)
Beban Tunjangan-tunjangan	9,152,595,461	36,548,552,553	(74.96)
Beban Uang Makan PNS	3,935,797,400	3,690,645,950	6.64
Beban Honorarium dan Vaksinasi	-	-	#DIV/0!
Beban Gaji pokok Pejabat Negara	6,844,200	44,487,300	(84.62)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	42,471,209,817	31,091,737,804	36.60
Beban Uang Lembur	883,858,000	952,414,950	(7.20)
Jumlah	85,120,337,744	101,437,649,289	(16.09)

*Beban Persediaan
Rp.9.349.500.997*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.9.349.500.997 dan Rp.10.391.928.451. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7,244,683,572	7,098,240,938	2.06
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	31,712,500	1,353,217,800	(97.66)
Beban Persediaan Bahan Baku	1,949,103,725	1,810,406,300	7.66
Beban Persediaan Lainnya	124,001,200	130,063,413	(4.66)
Jumlah	9,349,500,997	10,391,928,451	(10.03)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.53.969.985.092*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.53.969.985.092 dan Rp. 51.808.469.054. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	15,418,719,333	12,108,616,645	27.34
Beban Barang Non Operasional	15,560,937,351	19,493,204,603	(20.17)
Beban Jasa	9,198,557,633	9,048,685,668	1.66
Beban Jasa Lainnya	13,664,823,225	11,157,962,138	22.47
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	126,947,550	-	#DIV/0!
Jumlah	53,969,985,092	51,808,469,054	4.17

*Beban
Pemeliharaan
Rp.13.380.163.426*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.13.380.163.426 dan Rp. 12.458.053.478. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,156,707,011	5,234,818,682	(1.49)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,328,916,909	5,436,507,536	16.42
Beban Pemeliharaan Jaringan	152,100,000	18,000,000	745.00
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	281,636,277	241,934,145	16.41
Beban Persediaan Suku Cadang	1,443,753,229	1,499,293,115	(3.70)
Beban Pemeliharaan Lainnya	17,050,000	27,500,000	0.00
Jumlah	13,380,163,426	12,458,053,478	7.40

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.43.452.424.361*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.43.452.424.361 dan Rp. 39.931.579.138. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	27.792.802.851	25.021.130.578	11,08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.849.004.000	2.835.125.000	0,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.625.168	5.285.797.800	-9,18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.486.731.561	4.821.042.197	-6,93
Beban Belanja Biasa - Luar Negeri	3.304.813.187	1.693.929.261	95,10
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	218.447.594	274.554.302	-20,44
Jumlah	43.452.424.361	39.931.579.138	8,82

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.22.158.565.896

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.22.158.565.896 dan Rp.21.422.502.673. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan
2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14,984,708,300	15,983,100,403	(6.25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,074,998,962	4,402,624,385	37.99
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	230,886,214	188,132,391	22.73
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	191,458,516	231,589,376	(17.33)
Jumlah Penyusutan	21,482,051,992	20,805,446,555	37.14
Beban Amortisasi Software	639,471,980	543,133,907	17.74
Beban Penyusutan aset lain-lain	37,041,924	73,922,211	(49.89)
Jumlah Amortisasi	676,513,904	617,056,118	9.64
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	22,158,565,896	21,422,502,673	46.77

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.1.330.447*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.330.447 dan Rp. 118.399.722. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1.330.447	118.399.722	(98,88)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1.330.447	118.399.722	(98,88)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.1.994.105.568*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	165.659.846	42.675.927	288,18
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	45.293.212	8.983.680	404,17
Penerimaan kembali Belanja Lain-Lain TAYL	0	1.603.800	(100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	928.336	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	1.783.152.510	346.933.244	413,98
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.994.105.568	401.124.987	397,13

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.794.334.362.255

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.794.334.362.255 dan Rp. 292.289.167.337.

Defisit LO
Rp.(200.416.625.830)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.(200.416.625.830) dan Rp.(187.086.094.703). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 506.806.980.045.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.46.911.759*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.46.911.759 dan Rp.5.164.198.035. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi penyusutan gedung

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun
2018*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	46,911,759
Jumlah	46,911,759

*Koreksi Lain-Lain
Rp.0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp.203.142.388.245

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.203.142.388.245 dan Rp.177.160.111.541. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	30,108,160,496
Ditagihkan ke Entitas Lain	(233,252,591,166)
Transfer Masuk	(3,250,005,150)
Transfer Keluar	3,252,047,575
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(203,142,388,245)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp.30.108.160.496 sedangkan DKEL sebesar Rp.(233.252.591.166).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.252.047.575 terdiri dari:

No	Jenis	Nilai
1	Persediaan	756.800
2	Peralatan dan Mesin	3.893.729.500
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(642.438.725)
Jumlah		3.252.047.575

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.252.047.575.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp.0.

Ekuitas Akhir
Rp.797.107.036.429

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.797.107.036.429 dan Rp. 794.334.362.255.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pada Tahun anggaran 2018 sampai dengan Semester II oleh Inspektorat Jenderal Tanggal 6-8 Februari 2019 pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga masih terdapat beberapa hal yang harus dicatatkan, diurutkan sesuai dengan satuan kerja unit eselon II masing-masing:

1. Sekretariat Ditjen PKTN

- Terdapat Saldo Kas di Bendahara Lainnya dan Utang Kepada pihak ketiga sebesar Rp.11.054.000,- atas uang duka yang masih ditahan oleh bendahara pengeluaran karena terdapat sengketa pada ahli waris yang merupakan saldo tahun anggaran 2015.
- Uang makan Bulan Desember 2018 sebesar Rp.74.241.000 namun dibayarkan kepada Pegawai di Bulan Januari 2019. Atas kewajiban tersebut belum diakui pada Bulan Desember 2018 dan dilakukan perjumlahan pada Aplikasi SAIBA.
- Nilai Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.346.780.000,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen

- Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.9.180.652.500,- masih digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.418.175.000,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

3. Direktorat Tertib Niaga

- Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.986.195.457,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

4. Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.233.714.555,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

5. Direktorat Metrologi

- Terdapat sejumlah bidang tanah Direktorat Metrologi di jalan Pasteur No. 27 Bandung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga seluas 8,575 m² (3,5 m x 2,45 m), berupa sewa lahan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa yang tercantum pada Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan ATM bernomor 1761.1/SPK.5.6/PERJ/8/2015 dan 041/TAM-OPS/PKS/2018 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 50.190.000 (Lima puluh juta seratus sembilan puluh juta rupiah). Perjanjian sewa dimulai dari bulan 3 Januari

2012 sampai dengan 3 Januari 2015, selanjutnya diperpanjang dari bulan 3 Januari 2015 sampai dengan 3 Januari 2018. Namun perpanjangan Sewa Menyewa Ruangan ATM untuk periode 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Januari 2020, belum diterbitkan, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung belum mengeluarkan Persetujuan Usulan Sewa BMN hingga saat ini, dimana Direktorat Metrologi telah mengajukan surat permohonan persetujuan usulan sewa BMN sejak tanggal 8 November 2017 dengan nomor surat dinas 1544/SJ-DAG/SD/11/2017 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Sewa BMN pada Kementerian Perdagangan.

- Direktorat Metrologi pada tahun anggaran 2018 memiliki pagu anggaran Belanja Barang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Barang (521234) senilai Rp.4.588.745.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kegiatan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur berupa timbangan, dimana dapat direalisasikan sebesar 100%. Ketika dilakukan rekonsiliasi antara SAIBA dengan SIMAK-BMN, muncul persediaan belum register pada neraca SAIBA, dikarenakan akun 521234 jika ditelusur pada buku besar masuk ke dalam buku besar persediaan, dimana jika berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun anggaran 2018 yang masuk ke dalam persediaan adalah akun 5218 dan 526, sehingga menjadi dasar bagi operator persediaan untuk tidak mencatat transaksi tersebut pada sebagai persediaan serta tidak dapat dikategorikan sebagai persediaan. Setelah berkonsultasi dengan Direktorat APK Kementerian Keuangan, diperoleh

hasil jika transaksi tersebut harus dilakukan penginputan pada aplikasi persediaan, dikarenakan dalam Bagan Akun Standar (BAS) penjelasan dari akun 521234 adalah “digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.”. Oleh sebab itu, Dit. APK memberikan saran untuk dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan. Dalam penginputan pada aplikasi persediaan, karena aplikasi persediaan tidak dapat mengakomodir pembayaran lebih dari 1 (satu) tahap, maka berdasarkan hasil konsultasi, operator persediaan melakukan penginputan pada bulan desember 2018 yaitu pada saat tahap pembayaran kedua (tahap pelunasan), dimana tahap pembayaran uang muka dilakukan pada bulan November 2018. Untuk penginputan nilai timbangan tersebut, karena nilai perolehan termasuk ongkos kirim, maka untuk satu jenis timbangan terdapat dua harga, dimana nilai yang satu merupakan nilai pembulatan. Akun yang disarankan oleh Dit. APK untuk penginputan pada aplikasi persediaan adalah akun 526112- Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, yang kemudian disarankan dilakukan jurnal reklasifikasi ke akun 521234 pada aplikasi SAIBA. Namun setelah aplikasi SAIBA mendapatkan terima ADK dari aplikasi SIMAK, nilai yang diterima untuk akun 526112 hanya sebesar RP. 4.588.650.000, dimana kekurangan Rp. 95.000 masuk ke dalam Penyesuaian Nilai Persediaan.

6. BSML Regional I Medan

- Selisih Sebesar Rp.447.996.200,- merupakan
 - a. Penyetoran langsung ke Kas Negara tanpa melalui rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp.446.916.200,-
 - b. Penyetoran ke Kas Negara atas Pendapatan TAYL sebesar Rp.1.050.000,-
- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.900.000,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan dengan Nota Dinas Nomor 316/PKTN.4.9/ND/04/2018 tanggal 3 April 2018.

7. BSML Regional II Yogyakarta

- Pendapatan Bukan Pajak pada LRA BSML Regional II sebesar 1.337.144.156,- dengan rincian:

Pendapatan	MAP	Jumlah
Pendapatan Sewa Tanah, gedung, dan bangunan	425131	1.141.256
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	425284	1.325.826.900
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	425911	10.175.000
Pendapatan di LRA	Sub Total	1.337.144.156

Pendapatan Jasa Pengujian berdasarkan rekening Koran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

Bulan	Penerimaan	Penyetoran ke Kas Negara
Januari	29.000.000	34.260.000
Februari	17.603.500	12.343.500
Maret	16.000.000	16.000.000
April	16.943.500	16.943.500
Mei	37.960.000	42.460.000
Juni	18.270.000	20.270.000
Juli	95.745.000	89.245.000
Agustus	126.297.000	126.297.000
September	31.425.000	31.425.000
Oktober	62.522.500	62.522.500
November	201.584.500	204.734.500
Desember	109.955.000	106.805.000
Jumlah	763.306.000	763.306.000

Terdapat selisih antara penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan dengan Pendapatan yang dicatat di LRA sebagai berikut:

Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi	1.325.826.900
Penerimaan Rekening Koran Bendahara Penerimaan	763.306.000
Selisih	562.520.900

Selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan cara/metode pembayaran atas Jasa Kalibrasi. Metode pembayaran Jasa Kalibrasi pada BSML Regional II TA 2018 adalah:

- Rekanan Transfer ke Rekening Bendahara Penerimaan, kemudian oleh bendahara penerimaan ditarik, di buat kode billing dan disetor ke Kas Negara;
- Rekanan membayar tunai diterima oleh Juru Kasir, kemudian di buat kode billing dan disetor ke Kas Negara;

- Rekanan meminta kode billing kepada Bendahara Penerimaan dan setor langsung ke Kas Negara.
- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.226.036.515,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dari jumlah aset lain-lain tersebut diatas BSML Regional II belum mengajukan surat penghapusan ke Biro Keuangan.

8. BSML Regional III Banjarmasin

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.82.656.350,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

9. BSML Regional IV Makassar

- Pendapatan Bukan Pajak pada LRA BSML Regional IV sebesar Rp.461.144.356,-
- Terdapat BMN yang dihapuskan berdasarkan SK Kepmendag No.79 Tahun 2018 dengan harga perolehan sebesar Rp.123.095.450,- dengan nilai penjualan sebesar Rp.1.554.000,-
- Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.147.320.000,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

10. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

- Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.257.746.514,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

11. Balai Kalibrasi

- Pendapatan Bukan Pajak pada LRA Balai Kalibrasi sebesar Rp.3.237.524.700,- dengan rincian : Rp.3.230.099.100,- dari Pendapatan Pengujian,

Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Perdagangan Rp.7.425.600,- dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

- Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.902.431.970,- jumlah yang sudah diajukan penghapusannya kepada Biro Keuangan.

12. Balai Sertifikasi

- Keputusan Menteri Perdagangan RI No : 711 TAHUN 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris pada Balai Sertifikasi.

Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Sertifikasi Dit. Stadalitu Ditjen PKTN Kementeraian Perdagangan berupa 21 unit barang inventaris dengan harga perolehan seluruhnya sebesar Rp.157.753.950,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Penghapusan berupa penjualan atas Barang Milik Negara pada Balai Sertifikasi sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) langsung disetorkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau ke dalam rekening Kas Negara di Jakarta sebagai pendapatan negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan (CaLK) serta dilaporkan pada Semester II Tahun 2018 (data terlampir).

- Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Sertifikasi pada Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. 5.482.674,- pendapatan meliputi Penerimaan TAYL sebesar Rp.524.000 dan PNBPN sebesar Rp.5.482.150.000,- dalam laporan Bendahara Penerimaan PNBPN Balai Sertifikasi semester II tahun

2018 sebesar Rp.5.483.275.000,- pencatatan Laporan Keuangan dan Bendahara penerimaan ada selisih sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta sratus da puluh lima ribu rpiah).

Selisih sebesar Rp.1.125.000,- adalah kesalahan transfer dari PT. Dharmapala Usaha Sukses ke rekening Balai Sertifikasi dan selisih tersebut telah diselesaikan dengan Surat Pernyataan dan Bukti Setor oleh ke dua belah pihak (data terlampir).

13. Balai Mutu Barang

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.871.837.200 sudah diajukan Permohonan Persetujuan Usulan penghapusan BMN dan sudah ada Persetujuan Penjualan BMN dari Kementerian Keuangan No.S-38/MK.6/KN.5/2019 tanggal 23 Januari 2019.

Lampiran A1**Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
A Tanah							
1	TANAH PERSIL	-	593.083.855.000	-	-	-	593.083.855.000
Jumlah			593.083.855.000	-	-	-	593.083.855.000
B Peralatan dan Mesin							
2	ALAT BESAR DARAT	8	4.784.901.500	4.773.832.837	4.818.663	4.778.651.500	6.250.000
3	ALAT BANTU	7	4.001.539.528	3.880.283.861	28.468.176	3.908.407.972	93.131.556
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	16.092.054.837	14.308.959.025	1.073.866.921	14.751.975.948	1.340.078.889
4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	10	32.053.050	14.579.713	6.679.275	21.258.988	10.794.062
5	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	1.188.269.200	392.437.573	111.960.877	504.425.950	683.843.250
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		290.284.500	227.201.700	10.201.810	237.403.510	52.880.990
6	ALAT UKUR	4	22.983.445.000	21.146.845.364	507.855.318	21.654.700.682	1.328.744.318
7	ALAT PENGOLAHAN	5	921.363.079	566.919.372	94.503.929	661.423.301	259.939.778
8	ALAT KANTOR	5	9.560.143.439	7.094.846.654	752.226.289	7.774.809.943	1.785.333.496
9	ALAT RUMAH TANGGA	5	16.484.334.534	12.838.072.684	1.307.621.149	14.042.212.333	2.442.122.201
10	ALAT STUDIO	5	2.381.008.010	1.980.392.391	143.056.865	2.087.675.756	293.332.254
11	ALAT KOMUNIKASI	10	1.679.806.984	751.189.132	225.830.476	977.019.608	702.787.376
12	PERALATAN PEMANCAR	5	1.117.164.500	381.470.362	97.216.563	478.686.925	638.477.575
13	ALAT KEDOKTERAN	5	6.759.284.849	6.630.825.813	41.851.746	6.557.678.559	201.606.290
14	ALAT KESEHATAN UMUM	8	76.329.250	73.329.250	300.000	73.629.250	2.700.000
15	UNIT ALAT LABORATORIUM	15	199.327.022.875	174.992.708.628	4.676.378.751	179.968.302.155	19.358.720.720
16	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	17.944.391.019	11.365.523.634	1.139.646.620	12.505.170.254	5.439.220.765
17	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKT	10	4.717.318.775	1.895.058.538	306.173.495	2.201.890.033	2.515.428.742
18	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKU	10	3.057.561.750	2.941.003.550	13.732.030	2.954.735.580	102.826.170
19	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCT	7	281.215.300	278.254.934	2.960.366	281.215.300	-
20	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	15	7.142.269.869	5.277.791.329	401.615.993	5.679.407.322	1.462.862.547
21	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMI	15	3.047.481.434	2.188.824.313	194.257.576	2.383.081.889	664.399.545
22	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIB	10	28.684.647.710	10.586.268.729	1.699.799.737	12.285.881.466	16.398.766.244
23	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5	1.680.020.811	1.403.830.676	276.190.135	1.680.020.811	-
24	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	576.680.075	363.516.063	109.871.625	473.387.688	103.292.387
25	KOMPUTER UNIT	4	14.557.416.998	11.043.951.536	1.205.475.672	12.024.044.618	2.533.372.380
26	PERALATAN KOMPUTER	5	6.693.819.750	4.985.683.093	465.888.500	5.422.752.533	1.271.067.217
27	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	7.794.000	7.794.000	-	7.794.000	-
28	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	72.993.130	18.331.138	4.053.117	22.384.255	50.608.875
29	SUMUR	10	177.408.000	101.776.167	16.807.074	118.583.241	58.824.759
30	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10	146.850.000	-	4.895.000	4.895.000	141.955.000
31	ALAT PELINDUNG	10	2.530.000	253.000	506.000	759.000	1.771.000
32	ALAT KERJA PENERBANGAN	8	417.711.450	148.348.056	41.750.776	190.098.832	227.612.618
33	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOH	10	483.000	483.000	-	483.000	-
34	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	285.159.400	220.332.996	17.435.989	237.768.985	47.390.415
35	PERALATAN OLAH RAGA	5	62.750.000	62.750.000	-	62.750.000	-
Jumlah			377.235.507.606	302.943.669.111	14.983.896.513	317.015.366.187	60.220.141.419
C Gedung dan Bangunan							
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	88.749.932.667	2.902.219.946	5.816.062.302	8.718.282.248	80.031.650.419
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	5.970.237.000	119.080.565	238.161.130	357.241.695	5.612.995.305
3	TUGU/TANDA BATAS	50	376.988.000	10.387.765	20.775.530	31.163.295	345.824.705
Jumlah			95.097.157.667	167.423.600	6.074.998.962	9.106.687.238	85.990.470.429
D Jalan dan Jembatan							
	JALAN	10	646.240.000	167.423.600	206.347.700	373.771.300	272.468.700
Jumlah			646.240.000	167.423.600	206.347.700	373.771.300	272.468.700
E Irigasi							
1	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20	90.126.000	3.360.815	6.721.630	10.082.445	80.043.555
2	BANGUNAN AIR KOTOR	20	102.740.000	3.669.286	7.338.572	11.007.858	91.732.142
Jumlah			192.866.000	7.030.101	14.060.202	21.090.303	171.775.697

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
F	Jaringan						
1	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	26.227.452	11.342.518	1.566.836	12.909.354	13.318.098
2	INSTALASI PERTAHANAN	30	-	-	-	-	-
3	INSTALASI PENGAMAN	20	78.210.000	13.686.750	3.910.500	17.597.250	60.612.750
4	INSTALASI LAIN	5	113.375.000	113.375.000	-	113.375.000	-
5	JARINGAN LISTRIK	40	200.039.000	27.961.611	5.000.976	32.962.587	167.076.413
	Jumlah		417.851.452	30.337.898.214	10.478.312	176.844.191	241.007.261
G	Aset Tetap Dalam Renovasi						
1				-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
H	ASET TETAP LAINNYA						
3	BARANG BERCORAK KESENIAN	5	98.597.000	-	-	-	98.597.000
	Jumlah		98.597.000	226.646.000	-	-	98.597.000
I	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	ALAT BESAR DARAT	4	2.990.000	2.990.000	-	2.990.000	-
2	ALAT BANTU	4	26.448.600	299.268.600	-	26.448.600	-
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	12.198.473.000	11.703.701.573	41.320.000	12.159.850.144	38.622.856
4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	980.000	980.000	-	980.000	-
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	33.220.000	33.220.000	-	33.220.000	-
6	ALAT UKUR	4	227.472.200	226.646.000	923.200	227.472.200	-
7	ALAT PENGOLAHAN	8	17.770.000	17.770.000	-	17.770.000	-
8	ALAT KANTOR	5	581.323.051	512.453.591	5.282.460	581.323.051	-
9	ALAT RUMAH TANGGA	5	398.302.640	371.683.940	6.322.600	394.895.040	3.407.600
10	ALAT STUDIO	8	124.815.300	221.886.400	646.500	123.615.300	1.200.000
11	ALAT KOMUNIKASI	15	22.294.980	22.402.980	-	22.294.980	-
12	PERALATAN PEMANCAR	15	24.760.500	23.543.950	1.216.550	24.760.500	-
13	ALAT KEDOKTERAN	10	6.660.000	1.810.000	-	6.660.000	-
14	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	8.457.737.600	11.621.306.050	-	8.457.737.600	-
15	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	7	727.657.000	710.879.964	47.686.701	635.571.106	92.085.894
16	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	200.837.000	270.893.416	12.505.167	150.816.332	50.020.668
17	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	-	-	-	-	-
18	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	4	-	-	-	-	-
19	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	20.411.100	111.007.100	-	20.411.100	-
20	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	8	-	8.873.703	-	-	-
21	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	50	1.698.000	9.370.000	-	1.698.000	-
22	KOMPUTER UNIT	50	2.585.480.301	2.419.480.086	5.618.708	2.576.745.384	8.734.917
23	PERALATAN KOMPUTER	50	287.694.489	263.055.429	137.500	287.694.489	-
24	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	149.475.000	149.475.000	-	149.475.000	-
25	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	-	789.074.790	-	-	-
26	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	5	2.367.289.000	532.085.979	68.592.796	583.038.775	1.784.250.225
27	INSTALASI PERTAHANAN	1	36.960.000	14.039.663	1.206.334	15.245.997	21.714.003
	Jumlah		28.500.749.761	30.337.898.214	191.458.516	26.500.713.598	2.000.036.163
	Total		1.095.272.824.486	364.030.891.175	21.481.240.205	353.194.472.817	742.078.351.669